



## Diperiksa,

# Terdakwa Lebih Banyak Lupa

### ★ Dugaan Korupsi di RPH Temesi Gianyar

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi RPH (Rumah Potong Hewan) Temesi, Gianyar dilanjutkan pada Selasa (17/3) dengan agenda pemeriksaan dua terdakwa, yaitu AA Rai Asmara (mantan Sekkab Gianyar dan Ketua Panitia Pengadaan Lahan) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan dan Sekretaris Pengadaan Lahan). Dalam keterangannya, Asmara lebih banyak mengatakan lupa dengan alasan kejadian tersebut sudah terjadi sangat lama, yaitu pada 2002.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim Tipikor Denpasar pimpinan Early Sulistyorini, Asmara yang didampingi kuasa hukumnya, mengatakan tidak terlalu mengingat jelas pengadaan lahan untuk RPH Temesi yang akhirnya menjadi kasus korupsi ini. Namun, Asmara mengaku jika pada saat itu dirinya menjabat sebagai Sekkab Gianyar dan Ketua Panitia Pembebasan Lahan.

"Saya waktu itu sebagai ketua panitia pembebasan lahan," ujarnya saat ditanya majelis hakim. Namun saat ditanya terkait pembentukan panitia dan tugas-tugas panitia pada

saat itu, Asmara kembali mengatakan tidak ingat. Ia hanya mengatakan jika SK panitia tersebut dibuat Bagian Hukum dan ditandatangani oleh Bupati Gianyar saat itu, Cok Budi Suryawan (CBS).



● NUSABALI/YUDA  
SIDANG dugaan korupsi dana Rumah Potong Hewan di Temesi, Gianyar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (17/3).

"Kalau jelasnya saya tidak ingat karena itu sudah lama sekali," jelas Asmara yang menggunakan baju batik dan celana hitam ini. Sementara itu, IB Raka yang saat itu menjabat sebagai Kadis Peternakan dan Sekretaris Panitia lebih gamblang menjelaskan terkait kasus korupsi yang terjadi 13 tahun silam tersebut. Bahkan, Raka yang didampingi kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya dkk masih menyimpan beberapa dokumen terkait pengadaan lahan yang berada di bawah Dinas Peternakan tersebut.

Selain memeriksa dua terdakwa, juga dihadirkan saksi meringankan, yaitu mantan Sekretaris pribadi Sekkab, Nyoman Juwita. Dalam keterangannya, saksi lebih banyak ditanya terkait tugasnya sebagai sekretaris Sekkab saat itu, Asmara. Namun saat ditanya terkait pengadaan lahan untuk RPH Temesi, Juwita mengatakan tidak tahu. "Saya tidak

tahu masalah itu," ujarnya.

Setelah memeriksa dua terdakwa, sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Seperti diketahui, kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pembangunan RPH di Temesi, Gianyar pada 2002. Dalam pengadaan ini, dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar.

Dengan perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. Selain menetapkan AA Rai Asmara (mantan Sekkab Gianyar dan Ketua Panitia Pengadaan Lahan) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan dan Sekretaris Pengadaan Lahan) sebagai tersangka, makelar tanah, Kadek Aristana juga ikut menjadi pesakitan dalam kasus ini. rez

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 5



# Terkendala Bangun Jembatan Jalan Tembus Pembungan-Pindi Mangkrak

Warga sudah relakan tanahnya sepanjang 800 meter untuk badan jalan tembus hubungkan dua kabupaten itu. Namun untuk bangun jembatan butuh anggaran hampir Rp 15 miliar.

BANGLI, NusaBali

Pembangunan ruas jalan yang bakal menghubungkan dua kabupaten, tepatnya di Banjar Pembungan, Desa Jehem Tembuku Bangli dan Dusun Pindi, Desa Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung mangkrak bertahun-tahun. Padahal warga kedua desa yang sangat berharap besar akan jalan penghubung ini telah merelakan ratusan meter tanahnya untuk dijadikan badan jalan. Kendala utama adalah pembangunan jembatan di atas jurang yang memisahkan dua kawasan ini, yang membutuhkan dana belasan miliar rupiah.

Menurut warga Dusun Pembungan, Dewa Made Suyadnya,

sejatinya untuk badan jalan sudah dibuat sejak dua tahun lalu. Untuk pembukaan badan jalan sepanjang hampir 800 meter itu digarap oleh TNI melalui program TMMD tahun 2013. "Kami secara sukarela mengikhilaskan tanah kami untuk digunakan sebagai badan jalan," ujarnya, Selasa (17/3). Menurut informasi yang didengarnya terhambatnya pembuatan jalan penghubung ini karena terbentur pembangunan jembatan. "Mudah-mudahan dari pemerintah segera segera mewujudkan keinginan kami," ujarnya. Dia melanjutkan, harapan warga akan dibukanya jalan tembus ini sangat besar, karena akan memberikan dampak yang

sangat positif untuk perekonomian warga. Karena dengan jalur transportasi yang lebih dekat dan lebih lancar, warga di sana bisa lebih mudah menjual berbagai hasil pertaniannya.

Hal senada juga diungkapkan Dewa Nyoman Kembar, seorang

warga Pembungan. Bahkan Kembar mengaku dirinya juga sudah merelakan tanahnya untuk membuat badan jalan. "Kita sudah lama menanti kepada pemerintah, supaya jalan penghubung antar kabupaten ini segera dilanjutkan lagi," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bangli, Ir Ida Bagus Wediatmika, saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan proyek jalan tembus tersebut mengatakan, untuk menghubungkan jalan ke dua dusun itu harus dibuat jembatan. Dari perencanaan untuk membuat jembatan membutuhkan anggaran hampir Rp 15 miliar. "Kita sudah sempat mengajukan anggaran ke Pemprov, namun dari Pemprov hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar. Untuk dana sebesar itu membuat pondasi jembatan saja belum mencukupi," ujarnya.

Tambahnya, karena jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan antar dua kabupaten. Maka pihaknya juga telah menjalin kordinasi dengan Pemkab Klungkung, dan nantinya akan bersama-sama menyampaikan masalah ini ke Pemprov. "Mudah-mudahan dari Pemprov bisa merealisasikan keinginan warga," harapnya. **cr53**



• NUSABALI/DEWA

Warga menunjukkan jurang yang bakal dibangun jembatan penghubung, antara Banjar Pembungan, Bangli-Dusun Pindi, Klungkung, Selasa (17/3).

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 8



## Kasus Alkes RS Unud, KPK Periksa Nazaruddin

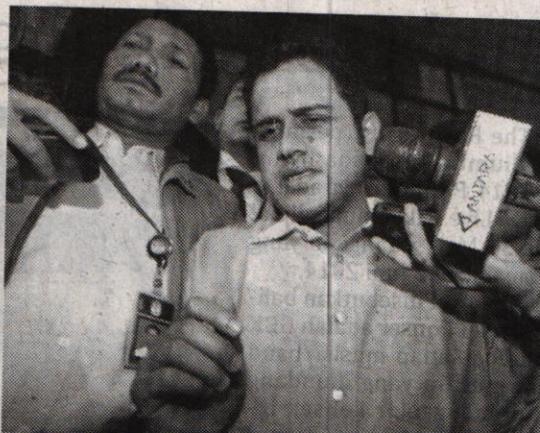
JAKARTA, NusaBali

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Unud). Mantan Bendahara Umum DPP Demokrat, Muhammad Nazaruddin diperiksa sebagai saksi untuk anak buahnya yang telah menjadi tersangka, Marisi Matondang.

Nazaruddin tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.30 WIB dengan menggunakan kemeja warna biru. Nazar terlihat berjalan tertatih ketika keluar dari mobil tahanan menuju ke ruang pemeriksaan. "Saya sakit, saya sakit," kata Nazar dilansir *detik.com*. Nazar saat ini ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia dipinjam oleh penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan ini.

Dalam agenda pemeriksaan, Selasa (17/3), ada 1 saksi lainnya yang juga dijadwalkan untuk diperiksa, yaitu Clara Maureen selaku mantan karyawan Grun Anugrah atau Permai Grup.

Namun belum diketahui apakah Clara telah datang atau belum. KPK sebelumnya menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang yang juga mantan anak buah Muhammad Nazaruddin dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Mergawa. Keduanya diduga melakukan permufakatan jahat dan melakukan



Muhammad Nazaruddin

• NET

mark-up dalam kasus ini.

Nilai proyek pengadaan alkes tersebut adalah Rp 16 miliar.

Sebenarnya anggaran proyek ini adalah multi-years, namun yang ditemukan adanya tindak pidana korupsi hanya di tahun anggaran 2009. Berdasarkan hitungan sementara, kedua tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7 miliar.

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 14



## Korupsi BOS di SMPN 1 Nusa Penida **Hakim Ragukan Keterangan Saksi Ahli**



• NUSABALI/YUDA

SIDANG dugaan korupsi dana BOS di SMPN 1 Nusa Penida dengan terdakwa Kepsek I Nyoman Utama (tengah) dan Bendahara, Ketut Darmaputra (kanan) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (17/3).

DENPASAR, NusaBali

Saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali dan ahli hukum pidana Universitas Udayana dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Nusa Penida. Majelis hakim sempat meragukan keterangan saksi ahli dari BPKP yang membeber kerugian negara dalam kasus korupsi ini.

Saksi ahli BPKP, Arif Sunardi yang diperiksa pertama mengungkap kerugian negara akibat korupsi dana BOS yang dilakukan kedua terdakwa, yaitu Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida, I Wayan Utama dan Bendahara BOS 2012, Ida Bagus Ketut Darma mencapai Rp 600 juta. Dengan rincian, kerugian pada 2012 Rp 375.217.036 dan kerugian pada 2013 Rp 308.548.846.

Kerugian negara tersebut didapatkannya melalui audit yang dilakukan selama 20 hari. Dalam audit tersebut ditemukan beberapa pos anggaran dana BOS yang digunakan tidak semestinya. "Juga banyak kami temukan bukti penggunaan dana BOS yang tidak lengkap dan tidak sah," jelas Arif di hadapan majelis hakim pimpinan Early Sulistyorini dalam sidang yang digelar Selasa (17/3).

Dijelaskannya, penggunaan dana BOS yang tidak semestinya

ditemukan dalam pengeluaran untuk guru honorer, bonus siswa dan atlit dan beberapa penggunaan dana BOS lainnya. Keterangan saksi ahli ini sempat diragukan oleh majelis hakim yang mempertanyakan proses audit yang dilakukannya.

Salah satunya cross check ke Kepala Sekolah dan Bendahara yang tidak pernah dilakukan auditor. Bahkan majelis hakim mempertanyakan keakuratan audit yang dilakukan saksi ahli. "Dalam kasus korupsi, negara tidak boleh dirugikan dan tidak boleh juga diuntungkan," tegas majelis hakim.

Selain memeriksa saksi ahli BPKP, juga dihadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Udayana, dr I Ketut Ariawan. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan kedua terdakwa. rez

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 5



# Mutasi Besar-besaran Pemprov Bali

Sebanyak 97 pejabat eselon IV Pemprov Bali dipromosikan dan atau dimutasi. Di antara mereka, ada yang belasan tahun menjabat di satu posisi.

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali melakukan mutasi besar-besaran untuk jabatan eselon IV selevel kepala sub bagian (kasubbag) dan kepala seksi (kasi) di lingkungan Pemprov Bali. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan Gubernur Made Mangku Pastika di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur di kawasan Niti Mandala Denpasar, Selasa (17/3), ada pejabat yang dimutasi setelah 18 tahun menjabat di satu posisi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I Ketut



GUBERNUR Made Mangku Pastika melantik puluhan pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Bali, Selasa (17/3) di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur di kawasan Niti Mandala Denpasar.

• HUMAS PEMPROV BALI

Rochineng usai pelantikan mengatakan, kali ini pelantikan pejabat eselon yang memang terbilang terbesar sepanjang sejarah mutasi dan promosi. Ada staf yang naik promosi, ada juga dimutasi karena pejabatnya sudah menjabat bertahun-tahun, sehingga 'karatan' di posisinya.

"Bayangkan, ada yang 18 tahun di satu posisi, ada yang 15 tahun, sampai minta dan mengajukan permohonan untuk dimutasi. Ini pertimbangan kami juga kenapa lama mutasi dan promosinya. Sehingga numpuk dan jadi banyak tahun ini. Pimpinan juga tidak mau sampai terjadi pejabat yang

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 3



Sambutan

bertahun-tahun bercokol di tempat yang sama, karena tidak efektif," kata Rochineng.

Menurutnya, kemarin dilantik sebanyak 97 pejabat eselon IV. Dari jumlah itu sebagian besar adalah pengisian tempat-tempat yang masih kosong, karena ditinggalkan pejabat sebelumnya yang naik promosi dari kasubbag atau kasi menjadi kabag (kepala bagian) atau kabid (kepala bidang). "Sebagian promosi, sebagian mutasi," ujarnya.

Ada dari staf naik ke eselon karena dinilai punya kemampuan. Keseluruhan ada 30 staf yang promosi ke jabatan eselon, sisanya 67 orang mutasi. "Ada yang beberapa orang naik atau promosi dari staf biasa ke eselon. Dalam proses ini kita tidak terukur, mungkin ini terbilang mutasi yang cukup besar, tetapi ini kebutuhan, dengan seleksi yang memenuhi standar tentunya," ujar birokrat asal Buleleng, ini.

Gubernur Made Mangku Pastika dalam sambutan pe-lantikan mengingatkan jabatan yang diemban bukanlah hak.

Tetapi merupakan kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada aparaturnya yang dinilai mampu memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. "Buktikan diri Anda bahwa Anda layak menduduki jabatan tersebut Caranya dengan kinerja yang baik, lebih proaktif dan responsif dengan tugas-tugas," ujar Gubernur Pastika yang didampingi Kepala Inspektorat Ketut Teneng dan Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra.

Gubernur Pastika mengatakan pejabat eselon IV di organisasi pemerintahan adalah ujung tombak SKPD, karena bersentuhan langsung dengan bidang layanan publik. "Yang promosi karena kepercayaan, yang dimutasi horizontal itu semata-mata karena penyegaran, sehingga yang diganti dan menggantikan bisa meneruskan tugas pejabat sebelumnya di tugas yang baru," tegasnya.

Pastika juga mengingatkan pejabat eselon II yang selevel kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro. "SKPD tolong jalin kerja sama yang baik supaya program berjalan terintegrasi," tandasnya. **nat**



## Pasek: Otsus Bisa Masuk Lewat RUU Provinsi Bali

★ UU 64/1958 Harus Diubah karena Tidak Sesuai dengan Kondisi Bali



Gede Pasek Suardika

DENPASAR, NusaBali  
Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini bergulir dan diperjuangkan wakil rakyat Bali, selalu mental di tengah jalan. Kini, wakil rakyat Bali di Senayan ubah haluan dengan memasukkan Otsus lewat Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali, yang sudah masuk dalam list (daftar) untuk dibahas di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua Panitia Perancang Undang-undang DPD RI 2014-2019, I Gede Pasek Suardika, mengatakan RUU tentang Provinsi Bali sudah masuk

dalam list untuk dibahas di Prolegnas. Dalam list, RUU Provinsi Bali masuk di urutan 27 dari total 137 RUU yang akan dibahas dalam Prolegnas di Senayan.

"Kalau nanti sudah siap, RUU Provinsi Bali langsung dibahas. Sekarang sudah masuk list untuk dibawa ke Prolegnas," ujar Pasek Suardika di Rumah Aspirasi DPD RI Dapil Bali, Jalan Ciung Wanara Denpasar, Selasa (17/3).

Menurut Pasek Suardika, RUU Provinsi Bali adalah salah satu pintu masuk bagi Otsus diperjuangkan selama ini oleh Provinsi Bali dan para wakil rakyat Bali di Senayan. Jika perjuangan Bali masih menggunakan label Otsus Bali, kata Pasek, pasti mental. "Orang di Jakarta alergi dengar kata-kata Otonomi Khusus ini," tegas Senator asal Singaraja, Buleleng ini,

Menurut Pasek, kalau UU Nomor 64 Tahun 1958 dikaitkan dengan keberadaan Provinsi Bali, banyak yang tidak sesuai. Misalnya, dalam UU 64 Tahun 1958 disebutkan bahwa Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten.

"Maka, strategi kita dengan masukkan perjuangan Otsus lewat RUU Provinsi Bali. Sekarang harus ada kajian akademisnya sebagai syarat untuk bisa masuk dalam Prolegnas. Sedangkan yang ada justru kajian akademis Otsus Bali. Apa saja nanti materinya, itu nanti dari Bali kajian akademisnya," lanjut Pasek.

RUU Provinsi Bali yang digulirkan ini, kata Pasek, untuk mengganti UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang PJS Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Provinsi Bali, NTB, NTT, yang pembentukannya berdasarkan UU Sementara Replublik Indonesia. "Jadi, secara hukum sebenarnya keberadaan UU Nomor 64 Tahun 1958 itu sudah tidak cocok jadi acuan hukum. Banyak yang tidak sesuai antara UU dengan kondisi Provinsi Bali yang diatur," ujar mantan Ketua Komisi III DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Demokrat ini.

"Padahal, sekarang Provinsi Bali ada 8 kabupaten dan 1 Kotamadya Denpasar. Ini sudah tidak cocok dan justru melanggar Undang-undang," kata Pasek, yang kini duduk di DPD RI hasil Pileg 2014 bersama tiga wakil rakyat Bali lainnya: Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, AA Nfurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, dan Kadek Lolak Arimbawa.

Dalam UU 64 Tahun 1958 juga disebutkan Provinsi Bali memiliki 26 anggota DPRD Provinsi. Padahal, jumlah anggota DPRD Bali saat ini mencapai 55 orang. Selain itu, UU Nomor 64 Tahun 1958 ini juga mengatur tentang Provinsi

NTB dan Provinsi NTT, bukan spesial hanya untuk Provinsi Bali.

"Sehingga, ini dasar kita bisa mengajukan RUU Provinsi Bali. Dari RUU Provinsi Bali ini kita memasukkan Otsus, sehingga lebih dapat diterima dan tidak membuat alergi," ujar Pasek yang duduk di Komite IDPD RI---membidangi masalah Pemda, Hukum, dan Perundang-undangan.

Ditegaskan Pasek, yang mendorong UU Nomor 64 Tahun 1958 layak dilakukan perubahan, karena di dalamnya hanya terdapat 11 pasal saja dan itu mengatur tiga provinsi sekaligus, yakni Bali, NTB, NTT. "Bayangkan, dengan 11 pasal mengatur tiga provinsi. Dalam perubahan ini (ajukan RUU Provinsi Bali), nanti ada kesempatan kita memperjuangkan banyak hal, mulai perimbangan keuangan pusat-daerah, dana bagi hasil, dan sebagainya," tegas Pasek. **nat**

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 1



**LINTAS**

**Penyidikan Dugaan  
Pungli di DKP, Kejari  
Datangkan 6 Saksi**

TABANAN, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan secara marathon minta keterangan dari sejumlah saksi untuk segera merampungkan dan menentukan tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 60 juta kepada CPNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan. Hingga Selasa (17/3), penyidik telah minta keterangan dari 10 saksi. Dari keterangan sepuluh saksi, semuanya mengarah ke calon tersangka yang tengah dibidik kejaksaan.

Kemarin, sebanyak 6 enam saksi didatangkan, mereka masing-masing, I Gst A, Nyoman J, Wayan M, Made G, Made S, Ni Made S. Mereka dimintai keterangan secara terpisah mulai pukul 09.30 hingga pukul 14.30 wita. Kasipidsus Kejari Tabanan, Fathur Rochman mengatakan sesuai jadwal hari ini pihaknya memanggil enam saksi lagi setelah sebelumnya sudah memeriksa empat orang saksi. "Sampai hari ini kita sudah periksa 10 orang saksi," ucapnya. Para saksi dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Secara terpisah Kajari Tabanan, Atang Bawono mengatakan keterangan para saksi akan dikaji dan mendalam untuk kemudian mencari siapa yang bertanggungjawab. **k21**

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 8